

Judul : Dalam APBN 2023 - Kendaraan Listrik Belum Disubsidi Nih
Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dalam APBN 2023 Kendaraan Listrik Belum Disubsidi Nih

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta agar kebijakan subsidi kendaraan listrik dikaji ulang Pemerintah. Sebab, rencana subsidi tersebut tidak ada dalam alokasi APBN 2023. Apalagi, pada tahun depan semua pihak harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Said mengatakan, rencana tersebut akan berdampak pada ekonomi domestik. Sementara, negara kita membutuhkan ketangguhan fiskal. "Apakah patut kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?" tanya politikus PDIP ini.

Dia bilang, subsidi untuk mobil dan motor sangat tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima setiap rumah tangga miskin. Apalagi, lebih dari separuh rakyat belum memenuhi standar makanan bergizi. Prevalensi stunting balita juga masih tinggi, tentu hal ini keluar dari batas kepatutan.

Dia menegaskan, mandat utama konstitusi dan bernegara adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Hal inilah yang harus jadi kacamata utama semua pihak dalam merumuskan kebijakan prioritas.

Said bilang, Pemerintah banyak memberikan insentif ke industri kendaraan listrik. Kini ditambah lagi dengan subsidi. Ini perlu dipertimbangkan

mengingat usaha menyehatkan APBN dan kebijakan mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan seimbang.

Said menerangkan, sudah ada ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Yakni, Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Beleid ini diharapkan memberikan nilai tambah terhadap kebangkitan industri dalam negeri. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mesti meningkat. Di mana TKDN untuk roda dua pada tahun 2026 minimum 80 persen dan 2030 untuk roda empat minimum 80 persen. "Kita berharap target ini bisa konsisten dipenuhi," ucapnya.

Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Pemerintah akan meminta izin kepada DPR terkait insentif mobil listrik yang dicanangkan pemerintah. "Lagi digodok. Nanti Pemerintah pasti akan minta izin ke DPR," ujarnya.

Agus bilang, besaran insentif yang akan diajukan yakni Rp 80 juta per unit mobil listrik, sebagaimana disampaikan sebelumnya. "Ini semua masih kita bahas mengenai angkanya untuk fiskal. Tapi kira-kira segitu insentifnya," kata dia. ■ TIF